

Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo

Oleh:

Bella Tri Inda Ningrum,

Isna Fitria Agustina

Progam Studi Administrasi Public
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



Pendahuluan

Kemiskinan masi menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan social. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak. Dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial, diperlukan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam menentukan sasaran program sosial. Sejalan dengan perkembangan e-government, pemerintah melalui Kementrian Sosial (Kemensos) mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk mendukung pengelolaan data kesejahteraan social.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, pengusulan, dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pendahuluan

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Sekardangan

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah (KK)
PBI	325
SEBAKO	73
PKH	50
YAPI	5

Sumber: Diolah Pebeliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan jumlah keluarga penerima bantuan sosial di Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, yang tercatat berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Data tersebut menggambarkan bahwa SIKS-NG digunakan dalam penerimaan bantuan sosial di tingkat kelurahan. Besarnya jumlah data yang dikelola tersebut menunjukkan pentingnya proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data secara tepat agar informasi mengenai keluarga penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pelaksanaan SIKS-NG masih menghadapi kendala berupa perubahan mekanisme DTKS ke DTSEN, kendala teknis sistem, serta ketergantungan pada satu operator utama dalam pengelolaan data.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo?

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan berdasarkan empat indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Metode

Metode	
Jenis Penelitian	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Lokasi Penelitian	Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
Fokus Penelitian	Impelementasi SIKS-NG dengan menggunakan teori George C. Edwards III (1980): komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Sumber Data	Data primer dan data sekunder.
Informan Penelitian	Ditentukan menggunakan purposive sampling. Operator SIKS-NG dan Sekretaris di Kelurahan Sekardangan.
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik Analisis Data	Menggunakann model analisis Miles & Huberman (1984) yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil

George C. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat indikator yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Edward III, menjelaskan bahwa kebijakan hanya dapat dijalankan secara efektif apabila para pelaksana memahami dengan jelas apa yang seharusnya mereka lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai perubahan mekanisme dari DTKS ke DTSEN tidak disampaikan terlebih dahulu kepada operator, sedangkan informasi kepada masyarakat mengenai pengusulan bantuan masih diberikan ketika masyarakat datang dan bertanya secara langsung. Informan menyatakan:

“kalau soal system ini memang kadang tidak ada informasi langsung yang jelas. seperti waktu perubahan DTKS ke DTSEN itu juga sama, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba saat mau buka aplikasi tidak bisa diakses, ternyata ada perubahan itu tadi. Jadi memang informasinya tidak turun secara jelas.” (Hasil Wawancara, 13 Agustus 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai SIKS-NG belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Hasil

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan jelas tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Menurut Edwards III, sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia serta fasilitas pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan didukung oleh sumber daya yang relatif memadai. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat satu operator utama yang menjalankan pengelolaan SIKS-NG dan satu staf yang dapat menggantikan ketika operator berhalangan. Sementara itu, dari sisi sarana prasarana tersedia komputer, laptop, printer, dan jaringan internet yang mendukung operasional sistem. Informan menyatakan:

“Operator aplikasi ini memang hanya saya sendiri, jadi sehari-hari yang pegang sistem ya saya. Tapi kalau misalnya saya ada halangan sudah ada satu orang lain yang bisa membantu untuk menggantikan sementara.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

Informan juga menyampaikan:

“Alhamdulillah kalau soal sarana prasarana di sini bisa dibilang sudah mencukupi. Di sini ada komputer, laptop, jaringan internet di sini juga mendukung.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

Hasil

3. Disposisi

Menurut Edwards III, disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan ditunjuk langsung oleh lurah berdasarkan kemampuan mengoperasikan komputer dan pengalaman administrasi. Operator tidak memperoleh insentif atau tunjangan khusus, karena pengelolaan SIKS-NG dianggap sebagai bagian dari tugas sehari-hari. Dukungan terhadap pelaksana diberikan melalui pengalaman dan pengetahuan tambahan, termasuk melalui bimbingan teknis. Informan menyatakan:

“Tidak ada seleksi atau tahapan khusus, jadi langsung saja ditunjuk oleh pak lurah dari staf yang ada di kelurahan ini, siapa yang menurut pak lurah dianggap mampu dan bisa mengoperasikan komputer, ya itulah yang dipilih.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

Mengenai insentif, informan menyampaikan:

“Kalau untuk insentif, sebenarnya tidak ada insentif khusus yang diberikan bagi staf yang ditunjuk mengelola aplikasi ini, tugas mengelola sistem ini dianggap bagian dari pekerjaan sehari-hari.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

Hasil

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan meliputi Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan belum memiliki SOP khusus yang mengatur secara rinci tugas operator. Dalam pelaksanaannya, operator lebih banyak mengikuti petunjuk yang tersedia dalam aplikasi dan menyesuaikan dengan sistem yang berjalan. Informan menyampaikan:

“Di sini memang tidak ada SOP khusus yang mengatur secara rinci bagaimana cara kerja operator aplikasi. Jadi tidak ada panduan tertulis di tingkat kelurahan. Kami mengikuti saja apa yang ada di dalam aplikasi itu langsung.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

Pada aspek fragmentasi, pelaksanaan SIKS-NG melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan dengan kewenangan masing-masing. Kelurahan berperan dalam memperbarui atau melaporkan perubahan data, sedangkan proses validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial.

“Data itu langsung terhubung ke pusat, dan yang melakukan validasi itu dari Kemensos. Jadi kami di kelurahan hanya update atau melaporkan kalau ada perubahan data.” (Hasil wawancara, 13 Agustus 2025)

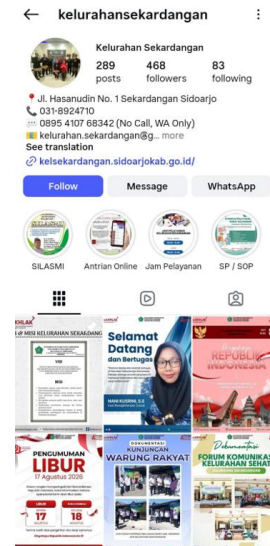
Pembahasan

1. Komunikasi

Berdasarkan teori Edwards III, komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum berjalan optimal. Pada aspek transmisi, operator tidak memperoleh informasi terlebih dahulu terkait perubahan DTKS menjadi DTSEN. Pada aspek kejelasan, informasi pengusulan bantuan kepada masyarakat masih disampaikan secara pasif, yaitu ketika masyarakat datang dan bertanya langsung ke kelurahan.

Keberadaan media sosial menunjukkan bahwa kelurahan telah memiliki sarana komunikasi, tetapi belum dimanfaatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi SIKS-NG dan pengusulan bantuan. Pada aspek konsistensi, informasi juga masih bergantung pada surat atau instruksi dari tingkat pemerintahan di atasnya.

Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan belum optimal karena penyampaian informasi mengenai perubahan sistem kepada operator belum dilakukan secara tepat waktu, sedangkan informasi kepada masyarakat belum disampaikan secara aktif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Media Sosial Kelurahan Sekardangan
Sumber: Akun Media Sosial Kelurahan Sekardangan

Pembahasan

2. Sumber Daya

Berdasarkan teori Edwards III, sumber daya dalam implementasi meliputi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas di Kelurahan Sekardangan relatif memadai, dengan 4 komputer, 4 laptop, dan 4 printer dalam kondisi baik serta jaringan internet yang mendukung pelaksanaan SIKS-NG.

Tabel 2. Data Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan Sekardangan

Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
Komputer	4	Baik
Laptop	4	Baik
Printer	4	Baik

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Dari sisi sumber daya manusia, Kelurahan Sekardangan memiliki 12 pegawai, tetapi pengelolaan SIKS-NG masih dilakukan oleh satu operator utama dengan dukungan satu staf pengganti. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai secara umum tersedia, tetapi masih terdapat ketergantungan pada operator tertentu.

Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi SIKS-NG relatif terpenuhi, terutama dari sisi fasilitas yang mendukung operasional sistem. Namun, dari sisi sumber daya manusia, ketergantungan pada satu operator utama menunjukkan bahwa pembagian tugas pengelolaan SIKS-NG masih perlu diperkuat.

Pembahasan

3. Disposisi

Berdasarkan teori Edwards III, disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator SIKS-NG ditunjuk langsung oleh lurah berdasarkan kemampuan komputer dan pengalaman administrasi. Meskipun tidak melalui seleksi formal, penunjukan tersebut telah mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sistem.

Dari sisi dukungan, operator tidak memperoleh insentif atau tunjangan khusus karena pengelolaan SIKS-NG dianggap sebagai bagian dari tugas sehari-hari. Namun, pelaksana tetap memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan seperti bimbingan teknis.

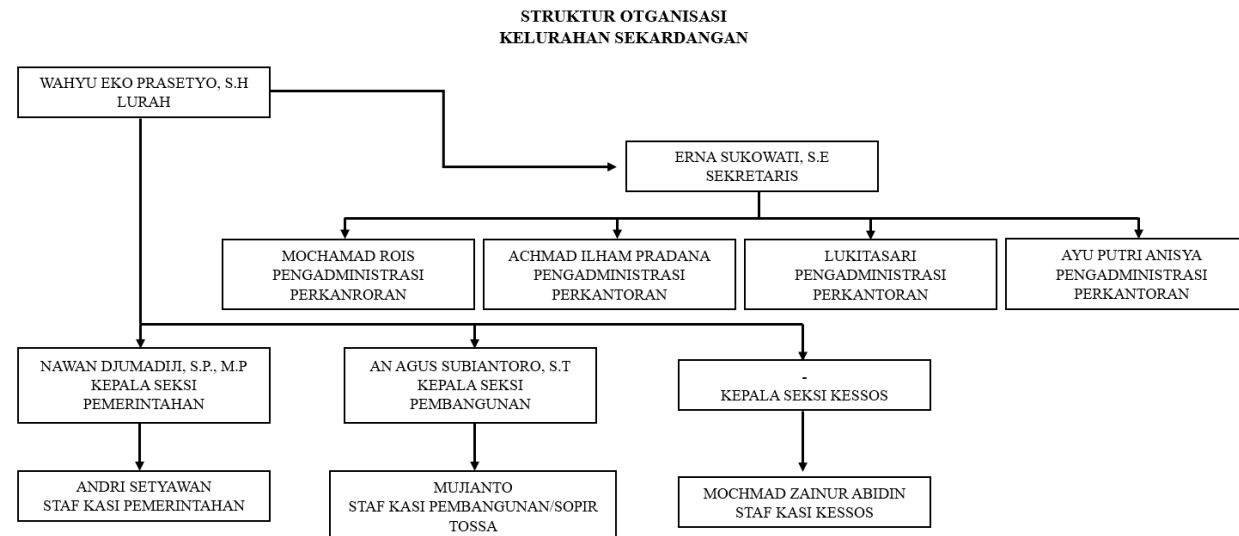
Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi SIKS-NG relatif mendukung, karena operator memiliki kemampuan yang sesuai dan tetap menjalankan tugas pengelolaan sistem. Namun, mekanisme penunjukan belum dilakukan secara formal dan belum terdapat insentif khusus bagi operator.

Pembahasan

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan teori Edwards III, struktur birokrasi dilihat melalui SOP dan fragmentasi. Pada aspek SOP, Kelurahan Sekardangan belum memiliki pedoman tertulis khusus yang mengatur pelaksanaan tugas operator SIKS-NG. Operator lebih banyak mengikuti petunjuk dalam aplikasi dan menyesuaikan dengan sistem yang berjalan.

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Sekardangan



Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Pembahasan

Berdasarkan Gambar 3, struktur organisasi Kelurahan Sekardangan menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Lurah, Sekretaris Kelurahan, kepala seksi, dan staf. Dalam pelaksanaan SIKS-NG, pengelolaan data kesejahteraan sosial menjadi bagian dari tugas kelurahan, dengan operator menjalankan kegiatan teknis pengelolaan data melalui sistem.

Pada aspek fragmentasi, pelaksanaan SIKS-NG memiliki pembagian kewenangan secara berjenjang antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan. Kelurahan berperan dalam memperbarui atau melaporkan perubahan data, sedangkan validasi dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi SIKS-NG belum sepenuhnya optimal. Pembagian kewenangan telah berjalan, tetapi belum adanya SOP khusus di tingkat kelurahan menjadi kelemahan yang perlu diperkuat agar pelaksanaan tugas operator lebih terarah dan konsisten.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKS-NG di Kelurahan Sekardangan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tetapi masih menghadapi beberapa kendala pada pelaksanaannya. Pengelolaan sistem masih bergantung pada satu operator utama meskipun terdapat staf pengganti, sementara perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSEN belum disampaikan terlebih dahulu kepada operator. Selain itu, informasi kepada masyarakat masih disampaikan secara pasif dan belum terdapat SOP tertulis khusus bagi operator di tingkat kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi SIKS-NG lebih berkaitan dengan komunikasi, ketergantungan pada personel tertentu, dan belum adanya pedoman kerja khusus, bukan pada keterbatasan fasilitas.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sebagai bahan pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan, khususnya penerapan SIKS-NG pada tingkat kelurahan dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kelurahan Sekardangan dalam meningkatkan pelaksanaan SIKS-NG, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan penyusunan SOP, serta menjadi masukan bagi pihak terkait dalam mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial yang lebih efektif.

Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik, "Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024." Accessed: Aug. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d2848c3990f081182125a416/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2024.html>
- [2] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen."
- [3] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Maret 2025 Kabupaten Sidoarjo," BPS.
- [4] I. F. A. Sekar Arum Puspita Ramadhani, "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa," *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi negara*, vol. 14, no. 04, pp. 28–38, 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>
- [5] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial."
- [6] Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah." Accessed: Aug. 07, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- [7] Republik Indonesia, "UU Nomor 9 Tahun 2015."
- [8] G. Fitri Azizah, R. Khairul Anwar, Y. Winoto, U. Padjadjaran Jl Raya Bandung Sumedang Km, and J. Barat, "Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional Mapping Global Research on Poverty and Welfare: Toward National Policy Reform," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.46807/aspirasi.v16i1.4779.
- [9] M. Hafel, J. Jamil, and M. Umasugi, "Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics," *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 44–58, 2022.
- [10] Republik Indonesia, "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 162 Tahun 2024."
- [11] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial."
- [12] I. R. Muhammad Diaz Handa Pratama, "Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal," *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 14, no. 04, pp. 39–52, 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>
- [13] Michael Lipsky, "Street Level Bureucracy Dilemmas of the Individual in Publik Services," Russel Sage Foundation.
- [14] A. M. A. A. Moh. Yunus, "Hitam Putih Kebijakan Publik di Indonesia."
- [15] Nafilah Dzakiyah Al Azizah and Isna Fitria Agustina, "Implementasi Bantuan Sosial (BANSOS) Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarnendo," *Journal Publicuho*, vol. 8, no. 1, pp. 322–331, Mar. 2025, doi: 10.35817/publicuho.v8i1.670.
- [16] E. H. F. Dinaningrum, "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan dan Verifikasi Bantuan Sosial di Desa Kledokan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, vol. 5, no. 1, pp. 70–78, 2025.
- [17] M. Sandelowski, "Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description?," *Res. Nurs. Health*, vol. 23, no. 4, pp. 334–340, 2000, doi: 10.1002/1098-240x(200008)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g.
- [18] Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," Alfabeta Bandung.
- [19] M. H. J. S. Matthew Miles, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Sage, 2014. Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: https://ia803100.us.archive.org/0/items/spradleyanalisisdatakualitatifmodeletnografi/Matthew_Miles%2C_Michael_Hberman%2C_Johnny_Sdana-Qualitative_Data_Analysis_A_Methods_Sourcebook-Sage_%282014%29%5B1%5D.pdf

